

**MONITORING CENTER FOR PREVENTION (MCP)
TAHUN 2024**

NO	AREA INTERVENSI	TITIK RAWAN KORUPSI	UPAYA PENCEGAHAN KORPSI	MCP		PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	LANGKAH AKSI	RENCANA AKSI				KET
				INDIKATOR	SUBINDIKATOR				TW1	TW2	TW3	TW4	
1	PELAYANAN PUBLIK	<ul style="list-style-type: none"> Masih banyak Daerah yang belum menetapkan aturan tata ruang daerah, sehingga perizinan tidak sesuai dengan peruntukan penataan ruang. Potensi terjadinya suap, pemerasan dan gratifikasi dalam proses pemenuhan persyaratan dasar terkait tata ruang. 	Pemda menyediakan kelengkapan regulasi tata ruang dan mendorong adanya transparansi tata ruang yang dapat diakses secara <i>online</i> oleh masyarakat serta menjadi dasar dalam menerbitkan persyaratan dasar perizinan	Kebijakan Layanan	Transparansi Tata Ruang	<ol style="list-style-type: none"> Sekda Inspektur Ka. Bappeda Kadis PUPR Kadis PTSP 	<p>Untuk Pemprov berupa Perda RTRW yang didalamnya termasuk RZWP3K.</p> <p>Untuk Pemkab/Kota berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> Perkada RDTR Data Jumlah RDTR sesuai RTRW 	<p>Penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha berdasarkan peraturan tata ruang yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> Perda RTRW No.11 Tahun 2012 tentang RTRW Wilayah Kabupaten Purwakarta Tahun 2011-2031; Perbup No.145 Tahun 2021 tentang RDTR Perkotaan Bungursari Tahun 2021-2041 Perbup No. 18 Tahun 2024 tentang RDTR Perkotaan Cibatu Tahun 2024-2044 	√	√	√	√	Perda dan Perbup Terlampir
2		Masih adanya praktik pungli/ penyuapan/ gratifikasi dalam pelaksanaan penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dan mutasi siswa	Pemda menyusun SOP PPDB dan mutasi siswa sehingga mencegah terjadinya pungli/ penyuapan/ gratifikasi dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dan mutasi siswa		Prosedur Pelaksanaan	<ol style="list-style-type: none"> Sekda Inspektur Kadis Pendidikan 	<p>Prosedur Layanan Pendidikan</p> <ol style="list-style-type: none"> SOP PPDB SOP Mutasi Siswa <p><u>Catatan:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Untuk Pempro, SOP terhadap layanan pendidikan tingkat SMA. Untuk Kabupaten / Kota, SOP terhadap layanan pendidikan tingkat SD dan SMP. 	-	-	-	-	-	
3		<ol style="list-style-type: none"> Masih adanya praktik pungli/ penyuapan/ gratifikasi dalam layanan kesehatan: <ul style="list-style-type: none"> Pengambilan nomor antrian; Pendaftaran kamar rawat inap Rumah Sakit. Masih adanya praktik pungli/ penyuapan/ gratifikasi dalam layanan kependudukan: <ul style="list-style-type: none"> Pengurusan KTP; Pengurusan Akta Kelahiran, Kematian 	<p>Pemda memastikan ketersediaan SOP pada layanan publik sektor kesehatan dengan memasukkan substansi Pencegahan terjadinya pungli/ penyuapan/ gratifikasi.</p> <p>Pemda memastikan ketersediaan SOP pada layanan publik pada sektor Kependudukan dengan memasukkan substansi Pencegahan terjadinya pungli/ penyuapan/ gratifikasi</p>			<ol style="list-style-type: none"> Sekda Inspektur Kadis Kesehatan 	<p>Prosedur Layanan Kesehatan</p> <p>SOP Layanan Kesehatan baik Puskesmas maupun RSUD yang bertujuan untuk mencegah terjadinya pungli/ penyuapan/ gratifikasi dalam layanan kesehatan.</p> <p><u>Catatan:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Untuk Pemprov, SOP terhadap layanan RS yang dikelola provinsi. Untuk kabupaten/ kota, SOP terhadap layanan Puskesmas dan RS yang dikelola kabupaten/ kota. <p>Prosedur Layanan Kependudukan (Kabupaten / Kota)</p> <p>SOP Layanan Kependudukan :</p> <ol style="list-style-type: none"> Pengurusan KTP Pengurusan Akta Kelahiran, Kematian. 	-	-	-	-	-	

4		Masih banyaknya pemohon yang mendatangi perangkatdaerah teknis untuk memproses perizinan atau persyaratan dasar.	Pemberian rekomendasi teknis difasilitasi oleh DPMPTSP untuk meminimalkan pertemuan langsung antara pemohon dengan OPD teknis			1. Sekda 2. Inspektur 3. Ka. PTSP 4. Ka. PUPR	SOP Sektor Perizinan 1. Laporan pelaksanaan koordinasi pemberian rekomendasi teknis yang disusun oleh DPMPTSP, Menggambarkan proses pemberian rekomendasi teknis yang menjadi kewenangan Pemda selama tahun 2024, dilaksanakan oleh OPD teknis, mencakup: • Hasil rekomendasi Teknis • Jumlah Izin yang dikeluarkan • Kendala dan Hambatan 2. Laporan Pelaksanaan proses penerbitan persyaratan dasar selama 1 tahun (untuk Kabupaten/ kota)	Pelaksanaan koordinasi pemberian rekomendasi teknis dari OPD teknis terkait penerbitan perizinan yang dilakukan oleh DPMPTSP sudah sesuai dengan Keputusan Bupati Purwakarta Nomor PM.05.02/Kep.59-DPMPTSP/2022 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha dan Nonperizinan Terintegrasi Secara Elektronik pada DPMPTSP Kabupaten Purwakarta	√	√	√	√	Terlampir
5		Layanan publik masih belum memenuhi harapan masyarakat dan terdapat praktik pungli/ penyuapan/ gratifikasi. Layanan publik perlu dilaksanakan sesuai dengan konsep layanan prima dan Pencegahan korupsi.	Pemda memastikan pelaksanaan layanan prima, salah satunya dengan memenuhi Standar Pelayanan sesuai PermenPAN RB No. 15 Tahun 2024 dan mencegah terjadinya pungli/ penyuapan/ gratifikasi.	Standar Layanan	Standar Pelayanan	1. Sekda 2. Inspektur 3. Kadis DPMPTSP 4. Kadis Pendidikan 5. Kadis Kesehatan 6. Kadis Dukcapil	Standar Pelayanan Publik pada Sektor Kesehatan, Perizinan, dan Kependudukan 1. Dokumen yang menunjukkan bahwa sudah ada Standar Pelayanan pada sektor kesehatan, perizinan, dan kependudukan. 2. Rekapitulasi layanan publik Yang sudah memiliki Standar Pelayanan dan layanan publik seluruhnya.	Pelayanan publik sudah sesuai dengan standar pelayanan pada DPMPTSP berdasarkan Perbup No.64 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta	√	√	√	√	Terlampir
6		Layanan publik Yang disediakan oleh pemda belum memenuhi harapan masyarakat	Pemda melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat untuk mendapatkan input perbaikan atas pelayanan publik.		Survei Kepuasan Masyarakat	1. Sekda 2. Inspektur 3. Kadis PTSP 7. Kadis Kominfo	1. Kuesioner Survei Kepuasan Masyarakat dengan memasukan parameter : a. Persyaratan b. Sistem, Mekanisme dan Prosedur c. Waktu Penyelesaian d. Biaya/Tarif e. Produk Layanan f. Penanganan Pengaduan g. Kompetensi Pelaksana h. Perilaku Pelaksana i. Sarana dan Prasarana j. Transparansi Pelayanan k. Integritas Petugas Pelayanan	Survey Kepuasan Masyarakat, Indeks Kepuasan Masyarakat dilaksanakan berkala secara online melalui link https://tinyurl.com/skm-kabpurwakarta dan data isian e-survei akan diolah dan direkap secara online oleh Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah untuk dihitung nilai capaian tingkat kepuasan masyarakat di setiap Perangkat Daerah Penyelenggara Pelayanan Publik. Setiap Perangkat Daerah dapat melihat progress hasil capaian tingkat kepuasan masyarakat setiap akhir triwulan tahun berjalan secara online melalui link https://tinyurl.com/hasil-skm-kabpurwakarta	√	√	√	√	Terlampir
7		Belum semua Pemda memiliki aplikasi <i>online</i> untuk memproses perizinan yang menjadi kewenangannya, sehingga berpotensi terjadi suap, pemerasan dan gratifikasi.	Pemanfaatan dan optimalisasi perizinan online	Kemudahan Layanan Publik	Aplikasi perizinan online	1. Sekda 2. Inspektur 3. Kadis PTSP 4. Kadis PUPR	Data jumlah perizinan yang menjadi kewenangan Pemda, yang dilayani secara <i>online</i> selama 1 tahun. <u>Catatan:</u> Perizinan yang dimaksud adalah perizinan yang menjadi kewenangan Pemda dan proses persyaratan dasar untuk pemenuhan perizinan berusaha.	Jumlah perizinan yang dilayani sudah sesuai dengan kewenangan pemda dan pemberian layanan perizinan telah dilaksanakan secara online melalui : 1. <i>Sistem Online Single Submission</i> (OSS) 2. Sicantik Cloud 3. Gawai Administrasi Perizinan Online (Gaspol)	√	√	√	√	Terlampir

8		Belum tersedianya informasi mengenai layanan publik yang terbuka dan transparan sehingga berpotensi menimbulkan praktek percalonan dan berpotensi terjadinya suap. Pemerasan dan Gratifikasi.	Pemda menyediakan media publikasi pada layanan publik baik perizinan, pendidikan, kesehatan, dan kependudukan		Media Publikasi	1. Sekda 2. Inspektur 3. Kadis PTSP 4. Kadis Pendidikan 5. Kadis Kesehatan 6. Kadis Dukcapil 7. Kadis Kominfo	Media Publikasi Layanan Publik Sektor perizinan, pendidikan, kesehatan, dan kependudukan: 1. Foto/ <i>softcopy</i> media publikasi offline, seperti brosure, pamflet, leaflet, dll 2. Screenshoot media publikasi online, website layanan buplik, aplikasi layanan publik . 3. Link website media publikasi online.	Layanan informasi terkait perizinan dilaksanakan melalui media offline dan media online serta dilaksanakan secara berkala	√	√	√	√	Terlampir
9		Layanan publik daerah masih belum memenuhi ekspektasi masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> Pemda menyelenggarakan Forum Komunikasi Masyarakat untuk menjaring harapan dan ekspektasi masyarakat terhadap layanan publik yang diselenggarakan Pemda. Forum Komunikasi Masyarakat dilaksanakan berdasarkan PermenPAN RB No. 16 Tahun 2017 		Forum Komunikasi Masyarakat	1. Sekda 2. Inspektur 3. Kadis PTSP 4. Kadi s Kese hata n 5. Kadis Pend idika n 6. Kadisdukc apil 7. OPD terkait layanan publik daerah	1. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Forum Komunikasi Masyarakat 2. Dokumentasi Pelaksanaan Forum Komunikasi Masyarakat 3. Rekapitulasi Permasalahan Layanan Publik yang disampaikan oleh masyarakat melalui FKM.	Pelaksanaan kegiatan forum komunikasi masyarakat dilaksanakan secara berkala	√	√	√	√	Terlampir
10		Penyelenggaraan perizinan dan non perizinan oleh Pemda kurang akuntabel.	Pemda memastikan izin diterbitkan sesuai dengan persyaratan yang berlaku melalui prosedur sesuai ketentuan perundang – undangan.	Pengendalian dan pengawasan	Pengawasa n Layanan Publik	1. Sekda 2. Kadis PTSP 3. Inspektur	Pengawasan Perizinan dan Non Perizinan 1. Dokumen perencanaan pengawasan yang disusun DPMPTSP 2. Laporan hasil pengawasan disusun DPMPTSP.	Pelaksanaan pengawasan perizinan berusaha dan perizinan nonberusaha dilaksanakan secara berkala	√	√	√	√	Terlampir
11		Penyelenggaraan layanan publik sektor pendidikan masih rawan dengan praktik korupsi termasuk pungli/ penyuapan/ gratifikasi terutama pada proses PPDB, mutasi siswa, dan penggunaan dana BOS	<ul style="list-style-type: none"> Pemda melakukan upaya Pencegahan terjadinya pungli/ penyuapan/ gratifikasi terutama pada proses PPDB dan mutasi siswa. Pemda melakukan upaya Pencegahan korupsi pada pelaksanaan dana BOS. 			1. Sekda 2. Inspektur 3. Kadis Pendidikan	Pengawasan Tata Kelola Pendidikan 1. Laporan Pemantauan dan Evaluasi Program Kebijakan dan Pengelolaan Dana BOS yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan. 2. Laporan Evaluasi Perencanaan dan Pelaksanaan PPDB yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan. 3. Laporan Reviu APIP tentang Pengelolaan Dana BOS. 4. Tindak lanjut hasil reviu Pengelolaan Dana BOS oleh APIP	-	-	-	-	-	
12		Masih tingginya risiko korupsi pada pelayanan publik. Skor IPAK tahun 2023 menunjukkan penurunan terutama pada dimensi pengalaman	Pemda menyusun rencana aksi perbaikan layanan publik daerah mencakup : <ul style="list-style-type: none"> Inovasi Pelayanan Prima Pencegahan Korupsi 		Layanan Publik Berintegritas	1. Sekda 2. Inspektur	1. Rekapitulasi Permasalahan dan	-	-	-	-	-	-

13		<ul style="list-style-type: none"> Aplikasi pengaduan masyarakat tidak dimanfaatkan oleh masyarakat dalam menyampaikan keluhan layanan publik. Pengaduan masyarakat tidak ditindaklanjuti. 	<ul style="list-style-type: none"> Pemda melakukan sosialisasi media pengaduan masyarakat untuk menyampaikan keluhan layanan publik. Pemda melakukan tindak lanjut keluhan layanan publik 		Tindak Lanjut Pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> Sekda Inspektur Kadis PTSP Kadis Pendidikan Kadis Kesehatan Kadis Kependudukan OPD terkait layanan publik lainnya 	<ol style="list-style-type: none"> Rekapitulasi Pengaduan Layanan Publik pada sektor: <ul style="list-style-type: none"> Perizinan Pendidikan Kependudukan Kesehatan Laporan Tindak Lanjut Pengaduan Layanan Publik pada Perizinan <ul style="list-style-type: none"> Pendidikan Kependudukan Kesehatan 	Pelaksanaan pelayanan pengaduan masyarakat dilaksanakan melalui offline dan media online serta tindak lanjut terhadap pengaduan layanan publik yang disampaikan oleh masyarakat dilaksanakan sesuai dengan SOP juga melibatkan OPD teknis terkait	√	√	√	√	Terlampir
14		<ul style="list-style-type: none"> Pemda tidak melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap layanan publik untuk Mendorong OPD layanan publik dalam melakukan perbaikan layanan publik. Rekomendasi APIP dalam perbaikan layanan publik tidak ditindaklanjuti 	APIP melakukan Reviu Layanan Publik dan memastikan rekomendasi perbaikan ditindaklanjuti oleh OPD Teknis Layanan Publik		Tindak Lanjut Reviu APIP	<ol style="list-style-type: none"> Sekda Kadis PTSP Inspektur 	<ol style="list-style-type: none"> Laporan Reviu APIP terkait dengan Layanan Publik Laporan Tindak Lanjut atas Hasil Reviu APIP kinerja Tata kelola Perizinan dan Non Perizinan yang disusun DPMPTSP. 	Pembuatan Surat Tindak Lanjut LHR Tata Kelola Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas PUTR Kab. P uwakarta Nomor PM.05.02/788-Perizinan/2023 Tanggal 30 Agustus 2023 perihal percepatan penyusunan Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)	√				Terlampir

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PURWAKARTA**